

BAB III

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP MESIR

Di dalam BAB III ini penulis akan banyak membahas tentang kerjasama yang telah dibangun oleh Amerika Serikat dan Mesir sebagai sekutu dari bidang militer, Ekonomi, politik regional dan demokrasi. Untuk memahami hal-hal tersebut terlebih dahulu penulis akan memulai dari sejarah kedekatan kedua negara yang dimulai dari Perjanjian Camp David.

A. Perjanjian Camp David

Perjanjian Perdamaian Camp David merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah yang ditandatangani tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih Amerika Serikat antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian damai Camp David ini merupakan perundingan rahasia selama 13 hari yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter. Perjanjian ini memiliki tiga komponen penting yaitu pengakuan Arab terhadap Israel dalam perdamaian, penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan yang diperoleh selama perang serta negara-negara Arab tidak akan mengancam keamanan Israel dan tidak akan membagi-bagi Yerusalem kepada siapapun.

Perjanjian ini diletarbelakangi oleh perang 30 tahun antara Israel dan Mesir sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Akibat perang berkepanjangan yang

dialaminya, Mesir menyadari bahwa masalah dengan Israel tidak dapat diselesaikan dengan pertempuran dan upaya diplomatik pun dimulai. Hal ini dilatarbelakangi juga oleh kerinduan masyarakat Timur Tengah untuk hidup damai sehingga kerja sama antar negara Timur Tengah dapat terwujud untuk mengelola sumber daya alam dan manusia yang mereka miliki bisa maksimal dari pada berperang yang hanya akan menyebabkan kerusakan. Inisiatif Presiden Mesir Anwar Sadat untuk mengunjungi Yerusalem dan disambut dengan baik oleh Parlemen, Pemerintah dan Rakyat Isreal yang mungkin juga menginginkan perdamaian. kunjungan tersebut kemudian dibalas oleh Perdana Menteri Israel, Mulailah Ismailia. Sambutan positif dari kedua negara ini menciptakan peluang perdamaian antara ke dua negara.

Perjanjian Damai David Camp ini terbagi menjadi tiga perjanjian, yaitu

1. Perjanjian Perdamaian di Tepi Barat dan Gaza

Perjanjian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama berisis kerangka kerja dalam negosiasi dalam pembentukan otoritas pemerintahan sendiri otonom di Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam melaksanakan SC 242 (Resolusi Dewan Keamanan PBB) dan prinsip-prinsip Keamanan PBB. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan mengakui otonomi dan hak-hak sah rakyat Palestina dalam jangka waktu lima tahun. Pembicaraan ini melibatkan negara Israel, Mesir, Yordania dan Palestina yang dimulai dengan penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza dan pemulihan otoritas pemerintahan di Palestina.

2. Perjanjian Damai Mesir dan Israel

Perjanjian ini menyangkut masa depan Semenanjung Sinai yang selama ini dikuasai oleh Israel setelah menang perang melawan Mesir. Akibat perjanjian ini Israel menarik pasukannya dari Sinai, mengevakuasi 4.500 penduduk sipil dan mengembalikan Sinai kepada Mesir serta Israel juga mengembalikan ladang minyak Abu-Rudeis Mesir di barat Sinai, sebagai timbal baliknya Israel bisa membangun hubungan diplomatik dengan Mesir, menjamin kebebasan lalu lintas melalui Terusan Suez. Dalam perjanjian ini juga melibatkan Amerika Serikat yang berkomitmen untuk memberikan beberapa miliar subsidi tahunan kepada Israel dan Mesir. Contohnya dari tahun 1979 sampai tahun 1997, Mesir menerima bantuan militer dari USD 1,3 miliar per tahun, yang juga membantu memodernisasi militer Mesir. Mesir sekarang menerima persenjataan Amerika Serikat seperti Tank Abrams M1A1, AH-64 tempur Apache dan F-16 jet tempur. (Azarva, 2007) Israel juga menerima USD 3 miliar per tahun sejak tahun 1985 dalam bentuk hibaj dan paket bantuan militer. Hal ini mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengamankan posisi sekutunya Israel di Timur Tengah.

3. Associated Principles.

Meliputi pengakuan penuh antara Israel dengan tetangga-tetangganya yaitu Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon, penghapusan boikot ekonomi dan menjamin kepastian yurisdiksi masing-masing negara akan memberikan perlindungan terhadap warga asing dari negara –negara tersebut.

Poin ini cukup penting bagi Israel mengingat negara tetangganya seperti Mesir, Yordania, Suriah dan Libanon kerap dihadapi Israel dalam konfrontasi militer. Walaupun memenangkan perang melawan Mesir, Israel tetap merasa tidak aman karena sebenarnya kemenangan yang diperoleh semuanya berkat bantuan barat dan Amerika Serikat. Di sisi lain Amerika Serikat juga tidak bisa terus-menerus menghadapi dunia Arab dalam perang untuk melindungi karena akan berdampak pada perekonomian Amerika Serikat.

4. Perjanjian Camp David.

Perjanjian Perdamaian Camp David pada tahun 1978 antara Mesir dan Israel terdiri dari dua kerangka kerjasama atau perjanjian yaitu: *A Framework for Peace in Middle East* dan *A Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and Israel*. Kerja sama yang kedua mengarah menuju perjanjian perdamaian Mesir dan Israel yang ditandatangani pada tahun 1979.

Perjanjian yang pertama terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama adalah kerangka negosiasi untuk membangun otoritas otonomi pemerintahan sendiri di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan untuk sepenuhnya mengaplikasikan Resolusi Dewan PBB 242. Perjanjiannya diadakan untuk mengakui hak-hak sah bagi warga Palestina dan prosesnya dengan diimplementasikannya pemerintahan sendiri bagi Rakyat Palestina selama lima tahun. Sudah cukup jelas bahwa perjanjian ini menyangkut semenanjung Sinai namun rupanya di masa mendatang diartikan berbeda oleh Israel, Mesir dan Amerika Serikat. Nasib Yerusalem dengan sengaja tidak dimasukkan dalam perjanjian ini. Bagian kedua

adalah mengenai hubungan antara Mesir dan Israel, yang isi utamanya ada pada perjanjian kedua. Bagian ketiga adalah “Afisiliasi Prinsip” yang mengemukakan prinsip-prinsip apa yang harus dipatuhi dalam hubungan antara Israel dan negara tetangga Arab lainnya. Perjanjian kedua berisi basis bagi perjanjian perdamaian enam bulan kemudian, yang khususnya menentukan nasib Semenanjung Sinai. Israel setuju untuk menarik pasukan bersenjataanya dari Sinai, dan mengevakuasi 4500 warga sipilnya dari sana serta menngembalikannya pada Mesir sebagai balasan diplomasi, dan menjamin kebebasan untuk melewati Terusan Suez dan jalur laut lainnya, dan terdapat larangan bagi militer Mesir untuk ditempatkan di semenanjung Sinai khususnya sejauh 20-40 km dari Israel. Israel juga setuju untuk membatasi pasukannya sajuh 3 km dari perbatasan Mesir dan menjamin kebebasan masuk dan keluar antara Mesir dan Yordania. Dengan penarikan tersebut, Israel juga mengembalikan tambang minyak Mesir di sebelah barat Sinai dan juga membuat Amerika Serikat mengirimkan subsidi beberapa milyar dolar pertahunnya bagi kedua negara, Israel dan Mesir dan dikirimkan sebagai hadiah dan paket bantuan.(Sharp, 2015, p. 16)

B. Kerja Sama Amerika Serikat-Mesir di Era Husni Mubarak.

Membicarakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Mesir sudah pasti tidak bisa menghilangkan peran figur presiden Mesir yang paling lama menjabat Husni Mubarak. Hosni Mubarak kali pertama menjadi presiden Mesir pasca tujuh hari kematian Anwar Sadat, presiden sebelumnya. Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal ketika menyaksikan parade

militer peringatan Hari Pahlawan di depan tugu Jundul Majhul di Nasr City, Kairo. Hosni Mubarak selaku wakil presiden saat itu berhak mengambil kedudukan presiden secara konstitusional sebagai hasil sidang darurat gabungan Majelis *Al-Sya'ab* dan *Al-Syuura*.(BBC, 2011)

Hosni Mubarak terkenal sebagai pendukung penuh kebijakan politik Anwar Sadat, termasuk politik luar negeri Sadat untuk mengakhiri masa "*no recognition, no negotiation, no peace*"(Zartman & Kremenjuk, 2005)² yang ditandai dengan Perjanjian Damai Camp David oleh Mesir, Amerika Serikat, dan Israel. Disamping itu, Sadat perlahan mulai mengalihkan kerjasamanya dengan Uni Soviet dan lebih mengintensifkan hubungan kerjasama bersama Amerika Serikat melalui kebijakan liberalisasi ekonomi dan bantuan pertahanan keamanan, meskipun mendapat penentangan dari rakyat Mesir. Seperti yang diketahui, pada saat itu Uni Soviet dan Amerika Serikat merupakan aktor penting dalam konstelasi konflik di Timur Tengah di mana Uni Soviet secara menyeluruh mendukung negara-negara Arab, sementara Amerika Serikat akan melakukan apapun bahkan bantuan dan gerakan militer untuk menjaga eksistensi Israel di kawasan tersebut.

Pengalihan arah politik luar negeri Sadat membawa dampak negatif untuk Mesir terutama dalam lingkup dunia Arab. Mesir dikeluarkan dalam keanggotaan Liga Arab, dan Kantor Pusat Liga Arab yang semulanya bertempat di Kairo

²*No Recognition, No Negotiation, No Peace* merupakan semboyan negara-negara Arab terhadap eksistensi Israel pada masa sengketa Perang Arab-Israel. Semboyan tersebut memiliki makna bahwa negara-negara Arab selamanya tidak akan mengakui keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah sekaligus tidak akan menyediakan jalan untuk berdiplomasi dan bernegosiasi dalam upaya perdamaian, yang diinginkan adalah perang menyingkirkan Israel. Nasser yang memimpin Mesir ketika menjadi aktor penting dalam persatuan Negara Arab dan pendukung semboyan tersebut.

dipindahkan ke Tunis, Tunisia. Berbagai sumber bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan Mesir praktis terkucil dari dunia Arab, karena melakukan perjanjian perdamaian tersendiri (*separate peace*) yang bertentangan dengan kesepakatan antar-Arab untuk hanya menerima penyelesaian perdamaian yang menyeluruh (*comprehensive peace*). Selain itu, Mesir tidak banyak mendapat dukungan seperti biasanya dan cenderung dikucilkan dari forum OKI dan GNB. Kondisi ini semakin kuat setelah diadakannya pertemuan puncak negara Arab di Baghdad yang mengeluarkan pernyataan “mengutuk perjanjian Camp David” dan menghasilkan sanksi terhadap Mesir berupa isolasi politik dan pembekuan sumber bantuan keuangan yang sedianya diterima dari beberapa negara petro-dollar Arab.

Mubarak dihadapkan pada situasi sulit sepeninggalan Sadat dan dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan Mesir dengan negara Arab. Kondisi tersebut oleh Mubarak merupakan suatu konsekuensi logis dan merasa tidak perlu merisaukan terjadinya perpecahan hubungan antara Mesir dengan negara Arab, walaupun sebenarnya negara Arab tidak mungkin mengucilkan Mesir dalam waktu yang lama karena tetap akan membutuhkan peran aktif bukan saja dalam usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel melainkan dalam penyelesaian masalah antar-Arab. Namun demikian Mubarak menyadari dengan kebijaksanaan politik luar negeri yang dilakukan Sadat, khususnya dukungannya terhadap persetujuan Camp David, tidak memudahkan baginya untuk segera melakukan pendekatan terhadap negara-negara Arab guna memperbaiki hubungannya dengan Mesir.

Mubarak berhasil memperbaiki dan memulihkan hubungan Mesir dan Uni Soviet dengan melakukan pendekatan pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua

negara meskipun tidak seakrab Perang Arab-Israel Oktober 1973.(Reed, 1994, hal. 21) Disamping itu, Mubarak sangat aktif dalam konsolidasi dalam forum GNB, OPA, dan OKI untuk kembali mengawali pendekatan terhadap negara-negara Arab. Berbagai peristiwa penting memudahkan Mesir memulihkan citranya sebagai aktor politik yang tidak bisa diabaikan perannya seperti dukungan Mesir ke Irak dalam perang Irak-Iran 1980-1988; sikap penentangan Mubarak dalam invasi Israel ke Lebanon; Kairo menerima Arafat sebagai pelarian akibat pengusiran PLO dari Lebanon, hal ini dinilai memiliki nilai strategis dalam pemulihan hubungan dengan negara-negara Arab lainnya mengingat PLO termasuk dalam kubu yang menentang perjanjian Camp David. Puncak dari keberhasilan kebijakan pendekatan oleh Mubarak kepada negara Arab, saat Mesir kembali diterima sebagai anggota Liga Arab tahun 1989 dan mengembalikan Kantor Pusat Liga Arab di Kairo.

Langkah yang dilakukan Mubarak untuk mengembalikan posisi Mesir di dalam komunitas Arab adalah salah satu langkah yang besar. Setelah sekian lama berperang bersama-sama melawan Israel, keputusan untuk melakukan perjanjian damai dengan Israel bukanlah hal yang mudah untuk diterima negara-negara Arab. Namun negara-negara Arab juga tidak bisa menampikkan bahwa posisi Mesir sangat vital bagi mereka. Pada akhirnya Mesir kembali masuk dalam lingkaran negara-negara Arab. Hal ini berdampak pada penghapusan sejumlah utang Mesir yang berasal dari negara-negara Arab petro-dollar dan ini berarti situasi yang sangat baik untuk Mesir memperbaiki situasi perekonomian dalam negerinya. Disaat yang sama Mesir tetap menerima bantuan luar negeri Amerika

Serikat. Berikut bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap Mesir sejak Anwar Sadat hingga kepemimpinan Morsi:

Tabel 3.1. *Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Mesir (dalam jutaUSD)*

Fiscal Year	Economic	Military	IMET	Total
1948-1997	23,288.6	22,353.5	27.3	45,669.4
1998	815.0	1,300.0	1.0	2,116.0
1999	775.0	1,300.0	1.0	2,076.0
2000	727.3	1,300.0	1.0	2,028.3
2001	695.0	1,300.0	1.0	1,996.0
2002	655.0	1,300.0	1.0	1,956.0
2003	911.0	1,300.0	1.2	2,212.2
2004	571.6	1,292.3	1.4	1,865.3
2005	530.7	1,289.6	1.2	1,821.5
2006	490.0	1,287.0	1.2	1,778.2
2007	450.0	1,300.0	1.3	1,751.3
2008	411.6	1,289.4	1.2	1,702.2
2009	250.0	1,300.0	1.3	1,551.3
2010	250.0	1,300.0	1.9	1,551.9
2011	250.0	1,300.0	1.4	1,551.4
Total	30,820.8	39,211.8	43.0	70,075.6

IMET=International Military and Education Training.

Sumber: Congress Research Center.

Pasca revolusi 1952, Mesir secara resmi menjadi sebuah negara republik dan konsisten menerapkan pola-pola demokratis dalam sistem politiknya. Dibawah konstitusi 1971, seorang Presiden yang dipilih setiap enam tahun sekali membentuk sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang secara khusus mengusulkan rancangan perundang-undangan kepada lembaga

parlemen yaitu Majelis Shaab dan Mejlis Shoura. Namun banyak pengamat mengatakan bahwa Mesir dibawah kepemimpinan Mubarak terkenal penerapan sistem otoriter yang dikuasai oleh satu partai berkuasa yang didukung oleh kekuatan militer.

Pola dan praktek otoriter Mubarak dalam sistem politik pemerintahan di Mesir semakin terasa kuat pada kurun waktu 1990-an. Terdapat dua faktor utama Mubarak mampu berkuasa secara luas, yaitu berada dalam naungan partai berkuasa *National Democratic Party* sebagai ketua umum partai tersebut, Hosni Mubarak menikmati kedudukan sebagai presiden berkuasa sekaligus menempatkan 90% perwakilannya di parlemen dan pemberlakuan Undang-Undang Darurat Negara sejak tahun 1981 pasca kematian Anwar Sadat yang berintikan pelegalan terhadap penangkapan dan penahanan tanpa proses peradilan terhadap mereka yang dianggap teroris dan mengancam keamanan nasional, hal ini dimanfaatkan secara maksimal untuk menyingkirkan kelompok-kelompok oposisi yang berpotensi sebagai penentang rezim yang mengancam kekuasaan mereka. Kedua faktor tersebut semakin diperkuat dengan beberapa perubahan konstitusi yaitu Hukum Berserikat 1993 dan Hukum Organisasi Non-Pemerintah 1999 terkait pembatasan hak-hak sipil dan politik; Hukum Kepartaian 1992 tentang perizinan dan pendanaan pembentukan partai baru.

Selama 18hari dari 25 Januari hingga 11 Februari 2010 jutaan warga Mesir turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menuntut presiden mereka turun dari jabatannya. Hal ini dilakukan rakyat Mesir setelah 5 tahun terakhir hidup dengan Undang-Undang Darurat digunakan secara brutal. Penangkapan kelompok oposisi

dilakukan dengan kekerasan. Manipulasi pemilihan parlemen Mesir yang menempatkan NDP sebagai partai penguasa dengan Perolehan 97% kursi, jutaan rakyat Mesir berdemonstrasi untuk menuntut turunnya Mubarak. Selama 30 tahun, demonstrasi inilah di mana pertama kali rakyat turun dengan tingkat kekerasan yang masif. Ditambah dengan jumlah demonstran yang banyak menyebabkan aparat keamanan serta militer Mesir mundur. Jumlah korban tewas dari pihak demonstran sudah terlalu banyak. Khawatirkan hilangnya legitimasi dan pengaruh militer di mata rakyat Mesir, militer mengambil sikap untuk tidak mendukung Mubarak dan memaksanya untuk meninggalkan kantor kepresidenan.

C. Kepentingan Amerika Serikat Terhadap Mesir Pasca Jatuhnya Husni Mubarak.

Secara historis, Mesir telah menjadi negara yang penting bagi Amerika Serikat kepentingan keamanan nasional jika dikaitkan dengan geografi, demografi, dan postur diplomatik. Dari sudut pandang geostrategis, Mesir mengontrol Terusan Suez, di mana 8% dari semua pengiriman maritim global per tahun melewati jalur ini. Selain itu, Mesir mempercepat berlalunya puluhan kapal US Naval melalui Terusan Suez, memberikan manfaat strategis untuk pasukan Amerika Serikat menyebrang ke Laut Mediterania atau Persia Teluk / Samudra Hindia untuk operasi sensitif di kemudian hari.

Demografis, Mesir, dengan populasi 83 juta jiwa, jauh lebih banyak dari negara-negara Arab lainnya, dan diperkirakan pada tahun 2050 penduduk Mesir

Pos, 2013)Wacana ini tentu sebuah kemajuan, apalagi Mesir merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Morsi juga menunjukkan bagaimana peran perempuan, kelompok liberal tidak dijadikan sebagai musuh atau sebatas saingan politik tetapi juga bisa dijadikan mitra pembangunan.

Sokongan kuat Ikhwabuk Muslimin di belakang Presiden Morsi dipandang akan mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Mesir untuk lebih kontra Israel dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Kemenangan Ikhwanul Muslimin pada pemilihan umum Mesir seakan memberikan bayangan akan terjadinya perubahan ekstrim politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Mesir sebagai respon atas perbedaan ideologi yang mendasar, sebagaimana yang pernah dialami oleh Kuba dan Iran. Akan tetapi, bayangan tersebut sirna ketika Presiden Morsi dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB pada 26 September 2012 menyatakan bahwa Mesir tidak akan merubah politik luar negerinya secara drastis, khususnya terhadap Amerika Serikat.(Ottaway M. , 2012) Lebih jauh lagi, Presiden Morsi juga berkomitmen untuk terus menjaga hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat, misalnya, dari pertemuan antara Presiden Morsi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang membahas tentang prospek kerja sama antara kedua negara.(VOA, Indonesia, 2011) Keharmonisan hubungan antara kedua negara semakin tampak jelas ketika Amerika Serikat tetap memberlakukan kebijakan pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada Mesir di bawah kepemimpinan Mohammad Morsi.(Sharp, 2015)

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Mesir tidak mengalami perubahan; Mesir tetap berhubungan baik dengan Amerika Serikat seperti pada masa kepemimpinan Husni Mubarak. Sebagaimana diketahui, Mesir di bawah kepemimpinan Mubarak merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Fenomena ini merupakan suatu paradoks jika melihat komposisi pemerintahan Mesir saat ini yang dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin. Secara normal, pergantian rezim sekuler Husni Mubarak menuju rezim kepemimpinan Mohammad Morsi yang disokong oleh gerakan Islamis Ikhwanul Muslimin seharusnya berpengaruh besar terhadap arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Mesir.

Menjaga hubungan dengan Mesir menjadi konsekuensi logis bagi Amerika Serikat mengingat kepentingannya di kawasan Timur Tengah khususnya upaya meredam perkembangan gerakan-gerakan Islam radikal. Pandangan realistik tersebut menyebabkan Amerika Serikat lebih memilih tindakan yang pasif terhadap promosi kebijakan reformasi sistem politik dalam negeri Mesir. Kondisi ini didukung oleh citra positif Mesir di kawasan Timur Tengah, semakin mampu dimanfaatkan sebagai jembatan penghubung kerjasama diberbagai aspek terhadap aktor-aktor di kawasan tersebut. Khusus untuk memperkuat hubungan dengan Mesir, Amerika Serikat menawarkan dan memberikan berbagai macam bentuk program bantuan. Meskipun bantuan tersebut secara bertahap berkurang setiap tahunnya, sebagai penerima bantuan Amerika Serikat terbesar kedua setelah Israel, pemerintahan Morsi tetap menikmati bantuan luar negeri yang Amerika Serikat untuk mereka.

D. Morsi Sebagai Mediator Gencatan Senjata Israel-Hamas.

Apapun demi keselamatan Israel. Segala cara akan ditempuh oleh Amerika Serikat. Dalam krisis besar pertama masa jabatannya. Morsi dipuji-puji sebagai mediator perdamaian, bekerja sama dengan para pejabat Amerika Serikat untuk mengatur gencatan senjata Israel-Hamas.

“Presiden Obama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Morsi atas usahanya untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan dan untuk kepemimpinan pribadinya dalam negosiasi proposal gencatan senjata”
(Office of the Press Secretary, 2012)

Obama juga menegaskan kembali "kemitraan erat" antara Washington dan Kairo, Gedung Putih menambahkan bahwa kedua pemimpin sepakat tentang pentingnya bekerja untuk solusi yang lebih tahan lama dalam situasi di Gaza.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan ia telah berbicara dengan Morsi dan mengucapkan selamat kepadanya atas perannya dalam gencatan senjata. Hague melalui twitter mengatakan bahwa ia telah berjanji dukungan Inggris terhadap Morsi. (The Telegraph, 2012).

Pemerintahan Obama menanggapi dengan positif mengenai proposal gencatan senjata Israel-Hamas yang ditawarkan oleh Morsi. Begitu pula dengan Barat dan Uni Eropa. Kondisi ini sekali lagi membangun kepercayaan terhadap Morsi untuk melindungi Israel.

E. Bantuan Dana Amerika Serikat Untuk Mesir Di Era Morsi.

Kondisi yang penulis jelaskan diatas menunjukkan citra positif Mesir di dunia Barat, hal semakin mampu dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sebagai jembatan penghubung kerjasama diberbagai aspek terhadap aktor-aktor di kawasan tersebut. Khusus untuk memperkuat hubungan dengan Mesir, Amerika Serikat menawarkan dan memberikan berbagai macam bentuk program bantuan dari segala aspek kerjasama. Meskipun bantuan tersebut secara bertahap berkurang setiap tahunnya, mesir masih tetap penerima bantuan Amerika Serikat terbesar kedua setelah Israel.

Bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat terhadap Mesir tidak pernah berbentuk dana segar. Semua dana bantuan militer yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk Mesir dikelolasendiri oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sendiri yang nantinya akan digunakan untuk membeli senjata namun atas nama pemerintah Mesir. Alokasinya antara lain terdiri dari hibah alutsista, pembangunan fasilitas-fasilitas militer, dan pelatihan pelatihan teknisi militer Mesir. Hal ini dilakukan Amerika Serikat untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan militer Mesir.

Hubungan militer kedua negara sangatlah dekat. Kebijakan Fiskal Amerika Serikat disetujui oleh Kongres. Bantuan militer sebesar USD 1,3 miliar dan bantuan ekonomi sebesar USD 250 Juta pada tahun 2012.(Sharp, 2015, hal. 16) Namun, Mesir harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah menjaga kesenambungan hubungan strategis dengan Amerika Serikat sebagai mana

tercantum dalam perjanjian damai Mesir-Israel 1979. Hal ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri baru yang ingin diwujudkan oleh Morsi untuk mewujudkan Mesir sebagai negara yang mandiri dan terlepas dari bayang-bayang Amerika Serikat dan meminta pembahasan ulang mengenai isi perjanjian Camp David.

Amerika Serikat juga secara rutin telah menganggarkan bantuan yang disetujui oleh Kongres untuk mendukung NGO yang ada di Mesir. Terpisah dengan program bantuan yang lain, Amerika Serikat menganggarkan sekitar USD 25 juta pada tahun 2010, 10% dari total bantuan ekonomi. (Sharp, 2015, hal. 16)

Pada akhir 2011, ketika Kongres meloloskan P.L. 112-74, Laporan Alokasi Act 2012, kebijakan ini menyetujui dana pembangunan untuk Mesir, Yordania, dan Tunisia. Tujuan dari dana pembangunan ini adalah untuk lebih mengembangkan sektor swasta Mesir, terutama di sektor pertanian dengan membuat investasi ekuitas di usaha kecil menengah dan menyediakan dana bagi pengusaha dengan pinjaman start-up dan bantuan teknis. Pada tahun 2012, Egypt-American Enterprise Fund (EAEF) Resmi beridiri. Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat mengingatkan kembali Kongres untuk segera mengeluarkan dana sebesar USD 60 juta dan memasukkannya kedalam rencana anggaran belanja negara Amerika Serikat tahun 2012. (Sharp, 2015, hal. 23-24)

Selain mendanai NGO yang ada di Mesir, Amerika Serikat juga membuat sebuah lembaga yang terpisah sebagai pelaksana bantuannya terhadap Mesir. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh

pemerintah Mesir sebagai pihak yang di percayakan untuk mendistribusikan dan tersebut ke NGO yang ada di Mesir.